



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**(KLASTER INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL – BAB X)**

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**

PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

1. Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
2. Struktur Organisasi dan Modal LPI
3. Penyediaan Lahan Untuk Proyek Strategis Nasional

UU DALAM KLASTER

PASAL

BARU = 19
PERUBAHAN = 0
HAPUS = 0

PERATURAN PELAKSANA

1. PP No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi
2. PP No. 73 Tahun 2020 Tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping

A Kluster dan Bab						
Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (BAB X)						
B Inventaris UU dalam Kluster						
C Daftar Topik						
Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI)		Struktur Organisasi dan Modal LPI				
		Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional				
D Jumlah Pasal						
Baru/Tambahan		19 Pasal				
		Perubahan				
		Hapus				
E Pemetaan Pasal per Pasal						
Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Kluster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
Pendirian Lembaga Pengelola Investasi	154-164			<p>1. Ketentuan baru terkait kegiatan investasi yang akan dilakukan pemerintah, baik oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi</p> <p>2. Modal Lembaga akan bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya</p> <p>3. Akan ada (satu) Peraturan Pemerintah yang akan terbit terkait tata kelola Lembaga pengelola investasi ini</p>		
Struktur Organisasi dan Modal Lembaga Pengelola Investasi	165-172			<p>1. Dasar pembentukan Lembaga Pengelola Investasi, dengan Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Menteri BUMN serta 3 orang profesional lainnya sebagai Anggota</p> <p>2. Modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan paling sedikit Rp15 triliun berupa Dana Unai</p> <p>3. Akan ada (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Lembaga Pengelola Investasi</p>		
Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional	173			<p>1. Pertanggungjawaban penyediaan lahan dan Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Usaha</p> <p>2. Akan ada (satu) Peraturan Pemerintah yang akan terbit terkait pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional.</p>		

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut

